

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA  
BERENCANA KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN GOWA**

<sup>1</sup>Gazali\*, <sup>2</sup>Irnawani Rahim

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Indonesia Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Staf Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

\*Korespondensi: [gazali@uit.ac.id](mailto:gazali@uit.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat program Keluarga Berencana di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang mengungkapkan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun faktor pendukung implementasi program yang peneliti susun adalah partisipasi masyarakat dan kerja sama antara pegawai dengan masyarakat. Sementara faktor penghambat adalah ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa selama dua bulan dengan sampel sebanyak delapan orang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Adapun teknik analisis datanya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi sudah berjalan baik. Aspek sumber daya belum berjalan dengan baik. Aspek disposisi belum berjalan dengan maksimal. Aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan. Faktor pendukungnya adalah besarnya animo masyarakat dalam berpartisipasi serta kerjasama yang tinggi atas setiap kegiatan program keluarga berencana tersebut berlangsung. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya anggaran serta masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program keluarga berencana tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Keluarga Berencana

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak masalah, baik itu dari segi luas, jumlah penduduk, dan sumber daya alam. Kemiskinan merupakan masalah yang mengejutkan dalam sejarah bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang bersatu dan tidak ada masalah yang lebih besar dari masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini dimana jutaan anak sulit untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik dan sulitnya memperoleh biaya perawatan. Minimnya

perhatian pemerintah yang kepada orang kurang mampu, pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja, menyebabkan jutaan orang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang terbatas akan makanan, pakaian dan tempat tinggal karena kurangnya jaminan sosial pemerintah untuk melindungi pertumbuhan dan orang miskin.

Kemiskinan biasa menjadi masalah besar disuatu daerah apabila tidak dikelola atau ditangani. Kemiskinan ini mengancam persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa dan harus diberantas di Indonesia. dia tidak baik-baik saja. Persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara dan seluruh bagian bangsa dan memerlukan upaya bersama dan terpadu negara di Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan publik yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini didasarkan pada perspektif historis, perspektif ideologis, perspektif logis, dan perspektif universal.

Keterlibatan pemerintah dalam membantu masyarakat miskin sangat strategis karena diperlukan suatu kebijakan yang dapat menciptakan program/kegiatan pembangunan yang terintegrasi antara pertumbuhan dan pemerintah, termasuk upaya peningkatan keterlibatan pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran dan masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir dan perilaku mental mereka. Keluarga berencana yang baik adalah bagian penting dalam membantu orang dan komunitas. Jadi, untuk memastikan peraturan dibentuk dengan cara terbaik, diperlukan pengaturan yang tepat.

Melihat kesejahteraan sosial di Indonesia, para politisi dan pemimpin pemerintahan dan semua orang yang ingin membangun Indonesia akan melihat ke belakang Perpres ini mengatur bagaimana rencana pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Ini memberi tahu kita tujuan nasional apa yang harus kita capai, dan bagaimana kita dapat menggunakan sumber daya kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adapun Pepres yang dimaksud No.15 Tahun 2010 diantaranya; Menjamin Perlakuan Bagi minoritas, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin, Mengembangkan dan memelihara operasi skala kecil dan mikro, Program dan bahasa bersinergi untuk mengatasi kemiskinan.

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan sebagai tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memenuhi cita-cita nasional guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan mandiri Mунuju masyarakat yang sejahtera. Perekonomian nasional

dikembangkan dengan berwawasan pasar sesuai dengan prinsip keterpaduan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keterpaduan perekonomian nasional. Pasal 34 ayat 2 juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menegakkan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif bagi semua orang dan tidak sesuai dengan undang-undang (Amandemen IV).

Pada kenyataannya bangsa kita adalah bangsa yang menganut paham negara kesejahteraan melalui penerapan model negara kesejahteraan partisipatif yang dalam literatur pekerjaan sosial disebut sebagai pluralisme kesejahteraan. Model ini menekankan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam upaya negara untuk mengatasi masalah sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan langkah-langkah jaminan sosial lainnya. Tata kelola operasional yang tanggap terhadap fenomena dan dinamika kehidupan masyarakat merupakan sarana mewujudkan cita-cita tersebut secara sistematis dan terpadu.

Secara Garis Besar, istilah pendampingan masyarakat Biasa dimaknai sebagai keadaan yang Makmur, Suatu keadaan dimana segala bentuk kehidupan terpenuhi, terutama kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Pemahaman ini menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Kebaikan sosial memiliki lima fungsi utama; Secara bertahap memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, Pengetahuan tentang sumber daya manusia, Pendidikan individu mengenai perubahan sosial dan adaptasi, Untuk tujuan pembangunan, menggerakkan dan menciptakan sumber daya masyarakat dan menyediakan kerangka kelembagaan untuk pengoperasian layanan terorganisir tambahan. Memecahkan kemiskinan lokal bukanlah tugas yang mudah. Kemiskinan tidak akan banyak berubah kecuali pemerintah dan mereka yang berkuasa dan posisi melakukan hal-hal dasar. Masalah kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan tindakan bersama dan terkoordinasi oleh semua pemangku kepentingan. Namun, pendekatan saat ini agak parsial dan tidak berkelanjutan.

Ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan juga memainkan peran di bawah standar. Kesukarelaan sosial, yang dapat menjadi sumber pemberdayaan yang signifikan dan sarana untuk mengatasi penyebab kemiskinan, juga mulai menurun. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan penyesuaian yang komprehensif dan sistematis. Dalam rangka

meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk Skema Desa KB (Keluarga Berencana). Program ini merupakan langkah awal untuk membangun komunitas dan mengelola seluruh wilayah.

Menurut laporan terbaru Keluarga Berencana 2020 (FP2020), per Juli 2017, lebih dari 309 juta perempuan dan anak perempuan di 69 negara memiliki akses ke alat kontrasepsi modern, dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya pada tahun 2012. Menurut sebuah laporan yang baru saja dirilis pada 5 Desember 2017, antara Juli 2016 dan Juli 2017, 84 juta kehamilan yang tidak diinginkan, 26 juta 125.000 aborsi tidak aman dan 125.000 kematian ibu dicegah. FP2020 adalah kemitraan global yang mendukung hak perempuan dan anak perempuan untuk bebas memilih kapan dan berapa banyak anak yang mereka inginkan. Lebih dari separuh anak perempuan dan perempuan yang dianggap "pengguna tambahan" berasal dari Asia, 21,9 juta, termasuk Indonesia.

Salah satu penyebab peningkatan ini adalah dampak dari program Keluarga Berencana (KB) pemerintah. Sejak 2016, Badan Keluarga Berencana Kecil Nasional (BKKBN) meluncurkan inisiatif baru bernama 'Kampung KB' yang menyasar kawasan perkotaan miskin dan padat penduduk, perkampungan nelayan, kawasan kumuh dan kawasan tertinggal lainnya. Desa KB diharapkan dapat bergema dengan program KB dan mampu menjangkau masyarakat khususnya desa, pemukiman dan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Hingga September 2017, telah dibangun 1.200 KB Desa di setiap kota dan provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat bertujuan untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi setiap masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sekaligus memberdayakan mereka untuk menarik perhatian keduanya. Ini juga merupakan peran utama dalam pembangunan. Sementara itu, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, penggerak dan penyedia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari Edward III yang mengungkapkan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **Hasil Penelitian**

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Dalam implementasi politik, konsep komunikasi umumnya melihat apakah komunikator politik dapat memahami dan menerima pesan. Komunikasi dianggap berhasil jika pesan yang dikirim dapat diterima dengan utuh. Menurut keadaan komunikasi politik saat ini, dikatakan efektif jika pesan media tentang tujuan politik tidak hanya diterima secara jelas tetapi juga dipengaruhi dan dilakukan. Model implementasi George Edward III, yang mengukur implementasi kebijakan dengan menggunakan empat faktor-komunikasi, sumber daya, regulasi, dan struktur birokrasi-digunakan dalam implementasi program studi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu inisiatif pemerintah. UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Menurut RUU DPR 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana adalah upaya mendorong, melindungi, dan mendukung kehamilan guna mengendalikan jumlah anak yang dilahirkan, jarak ideal, dan usia ideal kelahiran . hak untuk memiliki keluarga yang sehat melalui sarana reproduksi Mengikuti Adioetomo (2010:177) Tujuan KB adalah merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran sehingga tujuan reproduksi keluarga dapat tercapai. Dengan merencanakan dan mengatur jumlah dan usia anak, menentukan usia kehamilan yang ideal, dan mendukung hak-hak reproduksi, definisi yang diusulkan menekankan bahwa program KB bertujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Ketersediaan alat kontrasepsi juga berperan dalam menentukan keberhasilan program.

Pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dalam program KB menurut Affandi (2011) meliputi (1) Layanan disesuaikan dengan kebutuhan klien (2) Pelanggan dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan, (3) Menjaga kerahasiaan dan privasi (4) Waktu tunggu yang singkat, (5) Karyawan memberikan informasi tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia (6) Karyawan menjelaskan kepada klien kemungkinan layanan kesehatan untuk menawarkan berbagai pilihan pencegahan (7) Fasilitas pemeliharaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan (8) Layanan tersedia pada waktu yang telah ditentukan yang nyaman bagi pelanggan (9) Alat kontrasepsi dan aksesoris tersedia dalam jumlah yang cukup (10) Mereka

menggunakan sistem pemantauan dinamis yang membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul selama penggunaan (11) Ada mekanisme umpan balik pelanggan yang efektif. Kecuali untuk layanan kontrasepsi. Menurut Affandi (2011:28-43) alat kontrasepsi yang ada dalam program KB yaitu; Kondom, Pil, Suntik KB, AKDR-IUD, Implan, Tubektomi, dan Vasektomi. Dalam rangka penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, masyarakat diberikan kewenangan untuk memilih sendiri jenis alat-alat kontrasepsi yang akan digunakan dalam keluarganya tergantung dengan kecocokan dan seleranya.

**Komunikasi.** Menurut Edward III, perintah dan keputusan politik harus dikomunikasikan dengan jelas dan tepat kepada individu yang tepat agar mereka yang melaksanakannya dapat segera memahaminya. Selain itu, Edward III mengungkapkan bahwa sejumlah isu, antara lain implementasi transfer informasi, konsistensi, dan kejelasan komunikasi, berkontribusi terhadap komunikasi yang tidak konsisten dan implementasi kebijakan yang dirugikan. Selanjutnya, pelaksana kebijakan harus menyadari tanggung jawab mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Komunikasi harus secara akurat menjangkau eksekutif senior agar keputusan kebijakan dan perintah eksekutif menjadi efektif. Komunikasi yang baik dan efektif akan memudahkan pelaksanaan kebijakan KB sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada saat kebijakan tersebut dibuat. Ini karena komunikasi memiliki dampak besar pada seberapa baik kebijakan diterapkan. Komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksana program dan pengambil keputusan lebih konsisten dalam melaksanakan program yang relevan dengan tujuan masing-masing program.

Tiga indikator yaitu konversi, kejelasan, dan konsistensi implementasi kebijakan program KB di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa digunakan untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi. Konsistensi informasi (coherence), kejelasan informasi (clarity), dan konversi informasi (diseminasi) merupakan tiga aspek penting dalam komunikasi implementasi kebijakan. Informasi perlu disebarluaskan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan mereka yang dekat dengan mereka karena skala perubahannya. Informasi yang mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan diperlukan untuk dimensi kejelasan. Namun, agar tidak

membbingungkan pelaksana politik, kelompok sasaran, dan pihak terkait, dimensi koherensi mensyaratkan konsistensi informasi yang dikomunikasikan.

Komunikasi yang digunakan untuk melaksanakan program KB desa diukur oleh beberapa faktor, antara lain: isi pesan, media, dan penerima yang dituju, selain pengirim pesan. Dalam proses komunikasi para pelaksana kebijakan, mediasi memegang peranan penting. Dalam Augustine (2012: Edward III says: 150), implementasi yang efektif juga dapat dihasilkan dari komunikasi yang efektif. Di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa, Kebijakan Program Keluarga Berencana dilaksanakan dengan penyampaian informasi dari pemerintah ke lembaga politik penegak dan kemudian ke masyarakat umum.

**Sumber Daya.** Implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya. Edward IX (Winarno, 2012:184) berpendapat bahwa sumber dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kebijakan publik. Tugas implementasi bisa menyeluruh, tepat, dan konsisten; namun, implementasi biasanya gagal jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ada empat bagian sumber daya: sumber daya manusia yang diperlukan, informasi, kekuatan, dan fasilitas untuk menerjemahkan proposal kertas untuk penyampaian layanan publik. Sekalipun isi kebijakannya jelas, tidak akan berhasil jika orang yang menerapkannya tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Sumber daya manusia, seperti organisasi kompetisi, dan sumber daya keuangan adalah dua contoh dari sumber daya tersebut. Implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada sumber daya. Misalnya masih kurangnya jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Pattallassang khususnya yang membidangi program Keluarga Berencana (KB) tersebut. oleh karena itu, kadang kala ada pekerjaan yang harus tertunda karena bertepatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama pentingnya.

Dalam Agustinus (2012: Edward III mengatakan: 151) Ada dua jenis informasi mengenai implementasi kebijakan; jenis pertama adalah informasi mengenai implementasi kebijakan. Saat diminta bertindak, eksekutor harus tahu apa yang harus dilakukan. Kedua, informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Pelaksana perlu mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengikuti hukum. Implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada informasi, terutama informasi yang relevan dan memadai mengenai implementasi kebijakan. Padahal otoritas memiliki peran yang signifikan,

terutama dalam memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan. Dalam Augustine (2012: Edward III says: 152), otoritas formal diperlukan agar perintah dapat dilaksanakan. Otoritas atau legitimasi pelaksana dalam menegakkan kebijakan yang ditentukan secara politis disebut otoritas.

Kekuasaan publik para eksekutor menjadi tidak sah ketika kewenangan tersebut batal, sehingga memungkinkan mereka gagal dalam proses implementasi politik. Namun, ketika otoritas formal ada, penilaian efektivitas otoritas ini sering gagal dalam situasi lain. Namun, ketika kebijakan diterapkan, otoritas harus efektif. Namun, ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan mereka sendiri atau kelompoknya, efisiensi menjadi terganggu. Dalam Agustinus (2012: Edward III mengatakan: 152), fasilitas fisik memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa struktur pendukung—sarana dan prasarana—meskipun pelaksana memiliki staf yang kompeten, memahami apa yang perlu mereka lakukan, dan kewenangan untuk melaksanakannya. Untuk implementasi suatu kebijakan, kesepakatan sangat penting. Kantor, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan adalah pilihan. Salah satu aspek implementasi kebijakan adalah sarana atau sarana dan prasarana. Keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan didukung dengan tersedianya fasilitas yang memadai seperti gedung, tanah, dan peralatan kantor.

Sumber daya manusia (SDM) dan non-manusia seperti informasi, keuangan, serta sarana dan prasarana adalah contoh dari sumber-sumber tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Edward III menegaskan bahwa sumber daya sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Juga, Edward III mengatakan bahwa meskipun mandat untuk melaksanakan kebijakan dikomunikasikan secara akurat, jelas, dan konsisten, tidak akan berhasil jika pelaksana (executor) tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Akses ke sumber daya sangat penting karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia, keuangan, dan waktu, serta fakta bahwa formula politik bergantung pada satu sumber, memungkinkan individu untuk merespons dengan cara mereka sendiri sebelum kebijakan publik. dibuat tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Sumber daya manusia dan peralatan merupakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan.



Adanya sarana pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan program, seperti dana dan sarana prasarana, merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya. Edward III berpendapat bahwa ketersediaan sumber daya keuangan sangat penting untuk keberhasilan aksi politik. Secara alami, negara memberikan dukungan keuangan untuk kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan berbanding terbalik dengan tingkat dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi bila jumlahnya lebih banyak. Keterkaitan yang terjalin antara fasilitas dan sumber daya keuangan, seperti ketersediaan kantor dan berbagai perangkat elektronik untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Menurut Edward III, implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil meskipun eksekutif memiliki staf yang memadai, mampu memahami apa yang perlu dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Jelas dari gagasan langsung ini bahwa sumber daya peralatan dan fasilitas memainkan peran penting. Ada dua jenis sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan: baik peralatan bergerak maupun peralatan tetap. Fasilitas dan perlengkapan berupa gedung perkantoran, seperti ruangan yang memadai, komputer, dan printer, disebut sebagai fasilitas tetap. Ponsel, seperti mobil dan truk. Edward III menegaskan bahwa ukuran wawancara bukanlah satu-satunya faktor. karena kemampuan (kualitas) eksekutor sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi politik. Akibatnya, Edward III. mengusulkan dua skala utama, ukuran dan kompetensi, untuk mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan publik.

**Disposisi.** Dalam Winarno (2012: Klaim Edward III: 197), faktor ketiga yang memiliki implikasi signifikan terhadap implementasi kebijakan yang efisien adalah disposisi pelaksana kebijakan. Pelaksana lebih mungkin untuk melaksanakan tindakan yang dimaksudkan kebijakan ketika mereka antusias tentang hal itu dan membutuhkan bantuan. Di sisi lain, proses penerapan kebijakan menjadi lebih menantang ketika tindakan atau perspektif pelaksana menyimpang dari para pembuat keputusan. Menurut Edward III, sikap positif atau positif pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan bahwa mereka didukung dan termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan keinginan pembuat keputusan. Sebaliknya, proses implementasi kebijakan menjadi menantang ketika perilaku atau sudut pandang pelaksana berbeda dengan

pembuat keputusan. Disposisi atau sikap pelaksana adalah watak dan karakteristiknya, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratisnya. Akibatnya, sikap pelaksana kebijakan akan berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif, maka ia akan dapat melaksanakan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; Namun, jika implementor tidak memiliki sikap mendukung, maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan cara yang diinginkan. Ketika datang untuk menegakkan kebijakan publik atau menegakkannya, pola pikir orang yang membuat keputusan merupakan pertimbangan penting. Pelaksana kebijakan tidak hanya harus menyadari apa yang perlu dilakukan, tetapi juga dapat menerapkannya untuk mencegah hal ini terjadi dalam praktik agar efektif.

Implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran sangat bergantung pada keinginan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan. Kejujuran dan komitmen yang kuat adalah karakter krusial yang harus dimiliki oleh pembuat kebijakan. Komitmen yang tinggi dari para pelaksana politik selalu mendorong mereka untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sedangkan integritas mengarahkan para pelaksana untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip program yang telah digariskan.

Implementasi kebijakan secara signifikan dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan. Kebijakan dapat diimplementasikan sesuai keinginan pembuat keputusan jika pemimpin memiliki sikap positif; jika tidak, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan dengan benar. B. Komitmen, Kejujuran, dan Demokrasi adalah contoh jenis dan ciri atau setting pelaksanaan. Kebijakan dapat diimplementasikan sesuai keinginan pembuat keputusan jika implementor memiliki sikap yang positif. Proses implementasi kebijakan juga akan gagal jika pelaksana dan pembuat kebijakan memiliki karakteristik atau cara pandang yang berbeda.

**Struktur Birokrasi.** Ciri-ciri, norma, dan pola hubungan yang sering terjadi pada badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun aktual dengan pelaksanaan suatu kebijakan disebut struktur birokrasi. Karakteristik struktural formal organisasi dan karakteristik informal staf mereka membentuk komponen model ini. Selain itu, hubungan lembaga pelaksana dengan para aktor dalam sistem implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan. Struktur birokrasi tidak dapat didiskusikan secara terpisah dari badan pelaksana kebijakan. Sifat, norma, dan pola

hubungan yang berulang dalam badan eksekutif yang memiliki ikatan potensial dan aktual dengan kebijakan yang dijalankannya merupakan struktur birokrasi. Dalam pembahasan outcome struktur birokrasi disebutkan faktor-faktor yang ditemukan dalam implementasi kebijakan program KB di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya prosedur kerja dasar yang disebut juga dengan Standard Operating Procedure (SOP). Dalam melaksanakan suatu kebijakan, prosedur kerja dasar merupakan prosedur atau standar yang dijadikan acuan. Kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya jika prosedur kerja dasar sudah ada. Organisasi publik dan swasta sering menggunakan strategi ini untuk menangani situasi. Pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan memanfaatkan SOP. SOP juga menstandarkan tindakan pejabat dalam organisasi yang besar dan kompleks, yang dapat menghasilkan fleksibilitas dan keseragaman yang lebih besar dalam menegakkan peraturan. Pengulangan penggunaan SOP sebagian dapat dijelaskan oleh kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Praktisi jarang memiliki kemampuan untuk menyelidiki setiap situasi secara individual dan menyeluruh. Sebaliknya, mereka mengandalkan metode yang telah dicoba dan benar yang membuat proses pembuatan lebih mudah dan mencocokkan tanggung jawab program dengan sumber daya yang tersedia. Namun, ada kalanya SOP mengarah pada argumen yang tidak masuk akal. Pelaksanaan program KB di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa hampir sama dengan kabupaten Gowa lainnya.

Birokrasi yang tidak secara ketat mematuhi SOP, baik karena badan baru atau karena jumlah staf yang banyak, dapat merespons perilaku yang terdefinisi dengan baik secara hukum dengan lebih baik dan dapat membantu menghindari tindakan birokrasi yang berlebihan. Namun, kebijakan SOP juga memiliki manfaat selain mencegah implementasi. Dibandingkan dengan birokrasi yang tidak memiliki karakteristik ini, mereka yang memiliki proses perencanaan yang fleksibel dan tingkat kontrol yang tinggi atas program yang fleksibel lebih mampu beradaptasi dengan tugas baru. Intensitas pelaksanaan mempengaruhi pelaksanaan, seperti yang ditunjukkan oleh meteran dan klakson. Pelaksana dengan keputusan negatif dapat secara terbuka mengembangkan sikap terhadap tujuan program. Ketika ini terjadi, masalah implementasi dipertanyakan bawahannya dapat sepenuhnya menolak untuk berpartisipasi dalam program ini. Selain

itu, perilaku kurang waspada dapat mengakibatkan praktisi menjadi terganggu dan menyelinap pergi. Van Meter dan Van Horn menyarankan bahwa dalam keadaan seperti itu, individu melihat peran pemantauan dan penegakan untuk menjelaskan variasi dalam penegakan. Tampaknya apa yang ditakuti Meter dan Tanduk tidak terjadi di sini. Masyarakat umum mengantisipasi kebijakan e-procurement untuk barang dan jasa. Porsi anggaran ini hanya bersifat sementara, meski berdampak lebih besar pada personel dan peralatan. Biasanya, ini hanya berlaku jika pemasangannya masih baru.

Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan Edward III. ditemukan dalam Winarno (2012:207), dimana manajer dapat menggunakan waktu yang tersedia dan menyatukan aktivitas karyawan dalam organisasi dengan bantuan SOP. Peran dan tanggung jawab serta koordinasi antar pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan program. Pembagian tanggung jawab dimaksudkan agar kebijakan ini lebih mudah diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan kebijakan program KB secara efektif diperlukan koordinasi antar pelaksana kebijakan, meskipun masing-masing pelaksana memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Sementara fokusnya lebih pada konflik daripada disposisi para pelaksana, kecenderungannya juga dapat diarahkan pada empat komponen model lain yang secara langsung mempengaruhi faktor ini, yaitu; sumber daya politik, komunikasi antar organisasi, dan kegiatan penegakan, serta karakteristik otoritas penegakan dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel model implementasi dipengaruhi oleh potensi konflik satu arah.

Dampak variabel lingkungan terhadap hasil implementasi kebijakan sangat menarik bagi mereka yang tertarik untuk membandingkan kebijakan pemerintah dan publik. Edward III mengklaim bahwa sedikit perhatian diberikan pada bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi penegakan hukum. memiliki dampak signifikan pada seberapa baik lembaga penegak hukum bekerja. Standar Operasional Prosedur, atau lebih umum SOP (Standard Operating Procedure), dan fragmentasi adalah dua karakteristik birokrasi yang membedakan Edward III. Standard Operating Procedure (SOP) merupakan salah satu elemen struktur organisasi yang paling fundamental. SOP, menurut beberapa kalangan, cenderung menghambat implementasi kebijakan karena mendorong status quo untuk dipertahankan. Namun, prosedur operasi standar (SOP) masuk akal karena fleksibilitas dan kemudahan transfer ke departemen lain setelah ditetapkan.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Program KB**

### **Faktor Pendukung**

Partisipasi Masyarakat. Keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa, serta keikutsertaannya dalam memanfaatkan dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada, merupakan partisipasi. Selain itu, pengambil keputusan dapat mengusulkan kelompok atau komunitas yang mencakup barang, keterampilan, bahan, dan jasa, serta saran dan pendapat. Pengetahuan kelompok tentang isu-isunya sendiri, pertimbangan atas pilihan-pilihannya, pengambilan keputusan, dan penyelesaian isu-isu ini adalah contoh-contoh partisipasi. Partisipasi masyarakat sering dianggap sebagai komponen penting dari pemberdayaan masyarakat. Fakta bahwa partisipasi dipandang sebagai komponen penting dari proses pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa wacana masyarakat merupakan sumber konsepsi partisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi adalah masalah kekuasaan atau ekonomi politik kekuasaan yang dianjurkan oleh demokrasi. Tergantung pada keadaan, ada kalanya pemerintah dalam demokrasi harus campur tangan langsung dalam urusan warganya dan ada kalanya harus menyerahkan pengelolaan kepada masyarakat lokal. Dalam Sembodo (2006:21), Sumarto menyatakan bahwa “partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pemangku kepentingan sehingga kesepakatan dan tindakan inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, di mana disediakan ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi, dan memulai aksi kolektif.” Partisipasi masyarakat diartikan sebagai “partisipasi masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingannya dalam proses penyusunan rencana pembangunan” dalam UU No. 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d).

Adisasmita (2006:38) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan anggota masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan (pelaksanaan) proyek dan program pembangunan masyarakat setempat. Aktualisasi ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program atau proyek dikenal sebagai partisipasi masyarakat atau partisipasi dalam pembangunan. Adisasmita (2006:42) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah perwujudan kerelaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan.

Masyarakat harus diberdayakan, diberi kesempatan, dan diikutsertakan dalam proses birokrasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik, sesuai dengan prinsip partisipasi. Dalam konteks gagasan *good governance*, partisipasi masyarakat mengacu pada pelaksanaan kontrol atas kelebihan kekuasaan untuk mengarahkannya secara lebih efektif ke arah kepentingan masyarakat. Pembangunan dan pemerataan juga dibantu oleh adanya kerangka kelembagaan yang sesuai untuk partisipasi warga dan ruang untuk itu. Perencanaan pembangunan dibuat lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, artinya rencana dan program yang dibuat untuk pembangunan didasarkan pada keinginan masyarakat. Menurut Siregar (2001:19) partisipasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta pembagian manfaat program pembangunan, merupakan contoh kontribusi masyarakat. Proses aktif di mana masyarakat memimpin dan secara eksplisit menyatakan kemandiriannya adalah partisipasi masyarakat dalam evaluasi program. Kedua, menyesuaikan institusi dengan situasi sosial saat ini dan meningkatkan kendali atas sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan masyarakat.

Kerja Sama Antara Pegawai Dengan Masyarakat. Menurut Siregar (2001:19), partisipasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta pembagian manfaat program pembangunan, merupakan contoh kontribusi masyarakat. Proses aktif di mana masyarakat memimpin dan secara eksplisit menyatakan kemandiriannya adalah partisipasi masyarakat dalam evaluasi program. Kedua: menyesuaikan institusi dengan situasi sosial saat ini dan meningkatkan kendali atas sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan masyarakat. Sebagaimana dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Pattallassang dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dengan pihak masyarakat selaku penerima layanan. Semakin baik

kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, semakin besar potensi keberhasilan dari program Keluarga Berencana di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa tersebut.

Bekerja sama dalam suatu kelompok kerja dapat mengakibatkan setiap individu saling berinteraksi dan saling membantu untuk memecahkan masalah yang ada untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dengan demikian komunikasi yang baik dapat tercipta dimana hal-hal tersebut dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Bekerja sama dapat meningkatkan rasa persatuan setiap individu dalam kelompok kerja. Agar setiap kegiatan kelompok koperasi dapat berjalan dengan baik, maka harus menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Dengan menciptakan kerjasama, kesulitan apapun masalahnya, dapat diselesaikan dengan cepat. Karena tidak hanya bergantung pada satu orang untuk menyelesaikan masalah, tetapi banyak orang yang terhubung, saling mendukung. Dengan cara ini, pekerjaan selesai dengan cepat dan hasil diperoleh dengan cepat. Kolaborasi membuat tugas yang tampaknya sulit menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk diselesaikan. Ini karena banyak orang saling mendukung.

### **Faktor Penghambat**

**Ketersediaan Anggaran.** Dalam arti sempit, istilah “manajemen keuangan” mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran guna membiayai berbagai kegiatan organisasi, seperti administrasi atau akuntansi keuangan. Suatu kebijakan mengenai perolehan dan penggunaan dana oleh suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional organisasi, yang berupa pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan keuangan, secara garis besar diartikan sebagai pengelolaan keuangan. Proses merencanakan, mengalokasikan, dan membelanjakan uang dalam bisnis atau organisasi disebut manajemen keuangan. Dengan kata lain, penganggaran, mencari tahu dari mana uang berasal, bagaimana menggunakannya, dan menyimpan catatan adalah bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan umumnya memberikan setidaknya tiga keuntungan, yaitu (1) Suatu organisasi mulai secara teratur mencatat pengeluaran dan penerimaannya, (2) Pemanfaatan dana organisasi menjadi lebih teratur, terkoordinasi, dan menguntungkan dan (3) Dengan administrasi keuangan yang baik, kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat dihindari.

**Ketersediaan Sarana dan Prasarana.** Pengelolaan tanah, bangunan, perabot, dan peralatan pendidikan atau sekolah disebut sebagai "administrasi pabrik sekolah" dalam bahasa

lain. Kegiatan, pengorganisasian, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, serta penataan tanah, bangunan, perabot sekolah, dan prasarana lainnya secara efektif dan terarah dapat diartikan sebagai pengelolaan sarana dan prasarana. Moenir (1992-119) menegaskan bahwa konsep fasilitas mencakup semua peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu untuk melakukan pekerjaan, serta kepentingan yang berkaitan dengan organisasi kerja. Pengertian sarana oleh Moenir memperjelas bahwa sarana dan prasarana merupakan kumpulan alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan.

Fasilitas dan infrastruktur dapat melayani berbagai tujuan tergantung pada ukuran dan tujuan penggunaannya. Misalnya, sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan perjalanan, transportasi, dan sebagainya. Namun, tujuannya sama, yaitu untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti yang dimaksudkan. Sarana dan prasarana memiliki tanggung jawab utama untuk (1) Dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga menghemat waktu, (2) Membuat barang dan jasa menjadi lebih produktif, (3) Hasil kerja yang terjamin dan lebih berkualitas, (4) Pengguna atau operator dapat bergerak dengan lebih mudah atau sederhana, (5) Pasokan stabilitas karyawan lebih terjamin. 6) Dapat menimbulkan rasa aman pada mereka yang terlibat, dan (7) membuat yang berminat menggunakannya merasa puas. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan, sarana dan prasarana yang merupakan komponen penting dari seluruh kegiatan pembelajaran mempunyai tanggung jawab dan peran. Analisis kebutuhan yang tepat diperlukan pada saat merencanakan pelaksanaan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat dilaksanakan secara memadai, efektif, dan efisien.

### **Kesimpulan**

Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program KB di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Sebagai hasil dari kejelasan informasi, komunikasi telah berjalan dengan baik. Masih kurangnya staf dan infrastruktur, sehingga aspek sumber daya belum berjalan sesuai rencana. Masih ada karyawan yang diangkat berdasarkan disposisi bukan keahlian, dan tidak ada insentif yang diberikan kepada karyawan. Karena sudah ada Standard Operating Procedure (SOP) yang diikuti dalam pelaksanaan kegiatan terkait program KB, aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Tingginya



partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan program KB di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaannya. Sementara itu, pelaksanaan program KB terkendala oleh keterbatasan dana serta sarana dan prasarana.

### **Daftar Pustaka**

- Adioetomo, S.M. 2010. Dasar-Dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisasmitha, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affandi. 2011. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: PT. Bina Pustaka
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Amri Marzali. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Cet. 1. Bandung: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- . 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2000. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, J. Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Ismail. 2009. Public Policy. ( Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek ). Surabaya: Penerbit PMN.
- Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Said Zainal Abidin. 2012. Kebijakan Publik (edisi 2). Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Solichin Abdul Wahab. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke penyusunan Model-model Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cet.5. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Subiyantoro & Suwanto. 2007. Membangun Manusia Indonesia Dengan Peningkatan Kesehatan, Cet.Pertama. Jakarta: PT Intisari Mediatama,
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Syamsir Torang. 2012. Metode Riset Struktur dan Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta

- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- William M. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi 2). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ahmad Saleh. 2011. Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana Pria Dalam Pencegahan Angka Kelahiran di Kabupaten Bone. Makassar: Universitas Indonesia Timur
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa